

Pengaruh Unsur SPIP Terhadap Penatausahaan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat)

The Influence of SPIP Element on The Administration of Fixed Assets (Case Study on West Bandung Regency Government)

Wilhelmus Freksi Kurniadi

Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

E-mail: wilhelmus.freksi.amp16@polban.ac.id

Khozin Arief

Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

E-mail: khozin.arief@polban.ac.id

Yanti Rufaedah

Politeknik Negeri Bandung (D4-Akuntansi Manajemen Pemerintahan/Akuntansi)

E-mail: yanti.rufaedah@polban.ac.id

Abstract: *This research aims to determine the influence of the Government's Internal Control System both simultaneously and partially through each element on the Administration of Fixed Assets. The type of research that researchers use is quantitative research. The population of this study is a Regional Device Task Force (SKPD) in West Bandung Regency with a sample of 28 SKPD consisting of the Regional Secretariat, Regional Inspectorate, 20 Agencies and 4 Agencies located in the environment of the West Bandung Regency Government office. From the results of this study, simultaneously elements of the government's internal control system (SPIP) had a positive and significant effect on the administration of fixed assets and partially controlled and monitoring activities of internal control had a positive and significant effect.*

Keywords: *Government internal control System, elements of Government internal control system, Fixed assets Administration*

1. Pendahuluan

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan entitas pelaporan. Oleh sebab itu, pemerintah pusat maupun daerah wajib menyusun laporan keuangan secara periodik. Laporan keuangan tersebut dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik dan dibuat sebagai bentuk konkrit dari pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Pemakai/pengguna dari laporan keuangan tersebut antara lain: wakil rakyat, pihak-pihak lain yang membutuhkan, masyarakat, dan lembaga pengawas.

BPK kemudian mengaudit laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Dari hasil audit tersebut maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengeluarkan opini yaitu: Tidak Wajar, Tidak Memberikan Pendapat, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan. Pernyataan BPK tersebut dikeluarkan dengan tujuan sebagai alat ukur untuk menilai

keandalan laporan keuangan. Apabila BPK memberikan opini WTP maka laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah dikatakan cukup andal.

Berdasarkan LHP BPK TA 2018, Kabupaten Bandung Barat masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian yang berarti masih terdapat kesalahan material dalam laporan keuangannya. Salah satu permasalahan yang menyebabkan Kabupaten Bandung Barat mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian adalah dari kegiatan penatausahaan aset. Kegiatan penatausahaan aset sendiri mempengaruhi laporan keuangan pemerintah karena dari kegiatan tersebut akan menghasilkan laporan Barang Milik Daerah yang nantinya laporan tersebut akan menjadi dasar penyusunan neraca pemerintah.

Temuan-temuan BPK dalam kegiatan penatausahaan aset antara lain: Tanah senilai Rp.1.113.600.000 belum dapat ditelusuri keberaannya, aset berupa peralatan dan mesin senilai Rp. 35.974.680 yang digunakan oleh pihak ketiga tidak dilengkapi oleh dokumen pendukung, dan gedung dan bangunan senilai Rp.3.417.454.940,58 tidak ada keterangan luas dan letak serta lokasinya. Dari temuan BPK tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan penatausahaan aset tetap belum dilakukan dengan optimal baik dari kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Kegiatan penatausahaan yang baik harus ditunjang oleh suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik pula. SPIP sangat penting dalam kegiatan penatausahaan aset karena salah satu tujuan dari SPIP yaitu keandalan laporan keuangan dapat tercapai.

penelitian ini terdiri dari 6 rumusan masalah yaitu: 1) bagaimanakah pengaruh unsur lingkungan pengendalian terhadap penatausahaan aset tetap, 2) bagaimanakah pengaruh unsur penilaian risiko terhadap penatausahaan aset tetap, 3) bagaimanakah pengaruh unsur kegiatan pengendalian terhadap penatausahaan aset tetap, 4) bagaimanakah pengaruh unsur informasi dan komunikasi terhadap penatausahaan aset tetap, 5) bagaimanakah pengaruh unsur pemantauan terhadap penatausahaan aset tetap, 6) bagaimana pengaruh unsur sistem pengendalian intern pemerintah.

Fokus dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen agar menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kegiatan penatausahaan aset tetap berdasarkan unsur-unsur dalam SPIP.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Mengacu dari PP No 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dengan proses yang integral agar mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan agar memberikan keyakinan yang memadai. SPI yang dilakukan oleh pemerintah di pusat maupun daerah secara menyeluruh merupakan pengertian dari SPIP.

2.2. Tujuan dan Unsur SPIP

Mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008 Tentang SPI, tujuan dari SPIP sendiri antara lain: 1) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, 2) Laporan Keuangan yang andal, 3) Pengamanan Aset Negara, dan 4) tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah negara yang efektif dan efisien dengan keyakinan yang memadai.

Unsur Sistem Pengendalian Intern menurut COSO dalam Dull, et al (2012) yaitu: 1) Lingkungan Pengendalian yang berarti manajemen puncak bertanggung jawab agar menyamapaikan kegiatan tidak etis yang tidak ditoleransi serta nilai-nilai integritas dengan jelas, 2)

Penilaian Risiko yang berarti organisasi harus dapat menemukan dan menganalisis resiko bisnis beserta factor-faktornya dan menemukan cara untuk menanggulangi risiko tersebut. 3) Kegiatan Pengendalian harus dilakukan untuk mengurangi kecurangan terjadi, prosedur dan kebijakan untuk menemukan risiko yang perusahaan hadapi juga harus dirancang oleh manajemen. 4) Informasi dan Komunikasi yang berartiseluruh karyawan harus dikomunikasikan dan menerima info tentang SPI. 5) Pemantauan yang berarti Sistem Pengendalian Intern dilakukan pemantauan berkala dan apabila kecurangan terjadi secara signifikan harus dilaporkan segera kepada dewan komisaris dan manajemen puncak.

2.3. Aset Tetap

Mengacu pada PP No 71 Tahun 2010 Tentang SAP pengertian aset tetap adalah aset berwujud dan masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun yang digunakan masyarakat atau dalam kegiatan pemerintah. Adapun klasifikasi dari aset tetap berdasarkan PSAP 07 adalah Konstruksi Dalam Pengerjaan; Aset Tetap Lainnya; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Gedung dan Bangunan; Peralatan dan Mesin; dan Tanah.

Perlakuan akuntansi aset tetap menurut PSAP 07 antara lain: 1) Pengakuan aset tetap yang menyebutkan setelah hak kepemilikan aset telah berpindah maka keandalan aset tetap diakui. 2) Pengukuran aset tetap yang berarti akan diukur berdasarkan biaya perolehannya dan pada saat perolehan apabila tidak memungkinkan nilai wajar merupakan dasar nilai aset tetap. 3) Penyusutan Aset Tetap adalah pembagian dari nilai suatu aset tetap dan dapat disusutkan selama aset dalam masa manfaat.

2.4. Penatausahaan Aset

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengertian Penatausahaan Aset Tetap adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pelaporan, inventarisasi, dan pembukuan BMN/D sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMD rangkaian kegiatan dari pengelolaan aset sendiri yaitu Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; penatausahaan; penghapusan; pemusnahan; pemindahtanganan; penilaian; pengamanan dan pemeliharaan; pemanfaatan; penggunaan; pengadaan; dan perencanaan kebutuhan dan penganggaran.

Sedangkan kegiatan penatausahaan aset tetap terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pelaporan pembukuan, dan inventarisasi. Kegiatan pembukuan merupakan proses pencatatan untuk mendapatkan informasi dan data keuangan secara teratur yang meliputi biaya, penghasilan, modal, kewajiban, dan harta serta jumlah penyerahan barang atau jasa dan harga perolehan. Pendataan, pelaporan hasil pendataan BMN/D, dan pencatatan dilakukan melalui kegiatan yang disebut inventarisasi. Kegiatan pelaporan adalah kegiatan untuk menyusun laporan-laporan yang terkait dengan aset tetap seperti laporan barang pengguna, laporan barang pengelola, laporan barang kuasa pengguna, dan laporan BMN/D dan nantinya menjadi dasar untuk dipakai dalam menyusun neraca pemerintah baik pusat maupun daerah.

2.5. Kerangka Pemikiran

Kegiatan penatausahaan aset sangat penting dilakukan oleh setiap instansi pemerintah karena salah satu dasar penyusunan neraca pemerintah adalah Laporan Barang Milik Daerah. Laporan tersebut merupakan hasil dari kegiatan penatausahaan aset. Kegiatan penatausahaan aset sendiri terdiri dari beberapa kegiatan yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Untuk itu kegiatan penatausahaan aset harus dapat berjalan dengan optimal agar dapat menghasilkan laporan barang milik daerah yang baik. Agar kegiatan penatausahaan dapat berjalan dengan baik maka diperlukan suatu sistem pengendalian intern pemerintah agar salah satu tujuan SPI dapat tercapai yaitu laporan keuangan yang andal. agar penyelenggaraan kegiatan pemerintah dapat berjalan secara terkendali, tertib, serta efisien dan efektif maka diperlukan suatu Sistem pengendalian intern. Untuk itu sistem

pengendalian dan kegiatan penatausahaan aset tetap sangat penting dilakukan oleh setiap instansi pemerintah.

Dari uraian tersebut, dapat dihasilkan gambar paradigma penelitian yaitu:



Gambar 1. Kerangka pemikiran

2.6. Hipotesis Penelitian

Mengacu dari kerangka pemikiran yang telah dibuat pada sub bab sebelumnya, dapat dihasilkan hipotesis penelitian ini yaitu:

- 1 Ha₁: penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh Lingkungan pengendalian secara positif dan signifikan
- 2 Ha₂: penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh Penilaian resiko secara positif dan signifikan
- 3 Ha₃: penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh Kegiatan pengendalian secara positif dan signifikan
- 4 Ha₄: penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh Informasi dan Komunikasi secara positif dan signifikan
- 5 Ha₅: penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh Pemantauan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan
- 6 Ha: penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh Unsur SPIP signifikan serta positif secara simultan

3. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, deskriptif kuantitatif adalah metode yang dipakai. Penelitian ini terdiri dari

5 (lima) variabel X yaitu Pemantauan (X5), Informasi dan Komunikasi (X4), Kegiatan pengendalian (X3), Penilaian Risiko (X2), dan Lingkungan pengendalian (X1) serta variabel Y yaitu Penatausahaan Aset Tetap. Responden dalam penelitian ini berjumlah 56 orang dengan SKPD di kabupaten Bandung Barat merupakan populasi dalam penelitian dengan sampel sejumlah 28 SKPD. Data subjek adalah jenis data yang penulis pakai dengan data primer adalah sumber data yang dipakai berupa kuesioner dan wawancara.

Setelah dilakukan pengumpulan data, maka uji instrumen penelitian dilakukan dahulu yaitu terdapat uji reliabilitas dan uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui suatu data pada obyek yang diteliti yang sesungguhnya ditemukan persamaan dengan data yang dikumpulkan dan kriteria valid jika nilai r hitung melebihi r tabel (Sugiyono, 2019:175). Kemudian dilakukan uji reliabilitas agar dapat diketahui apakah tingkat keakuratan, ketepatan, konsistensi instrument, atau kestabilan dalam mengungkapkan gejala tertentu walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda dari kelompok individu ditunjukkan oleh instrumen yang dipakai dengan kriteria nilai *Cronbach Alpha* $\geq 0,60$ (Sugiyono, 2019:176).

Langkah selanjutnya setelah uji instrumen penelitian adalah pengujian asumsi klasik yang dilakukan untuk menguji kualitas dari data penelitian. Uji normalitas dilakukan guna mengetahui berdistribusi secara normal atau tidaknya suatu data (Ghozali, 2018:161) dengan melakukan uji statistic non-parametrik one-sample Kolmogorov Smirnov dan dinyatakan berdistribusi normal apabila perhitungan uji menunjukkan profitabilitas signifikan bernilai (α) diatas 0,05. Selanjutnya uji multikolinearitas dilakukan agar mengetahui apakah terdapat korelasi antar model regresi yang dipakai dengan variabel bebas dan dikatakan tidak adanya multikolinearitas jika nilai dari VIF kurang dari 10 atau nilai tolerance lebih dari 0,10. Kemudian uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengji apakah tedapat ketidaksmaan varian dai residual dengan pengamatan lain pada model regresi(Ghozali, 2018:161) dan dikatakan tidak ada heterokedastisitas apabila mebuat pola yang acak, serta titik menyebar pada sumbu Y tidak di angka 0 dalam grafik *scatterplot*.

Setelah uji asumsi klasik dilakukan, tahap lanjutannya yaitu uji regresi linier berganda untuk mengetahui bagaimana variabel independent dan variabel dependen berhubungan dijelaskan dengan persamaan yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5$$

Dimana:

- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- Y = Penatausahaan Aset Tetap
- X1, X2, X3, X4, X5 = Unsur-unsur SPIP

Untuk melihat pengaruh secara parsial dari masing-masing varibael X terhadap variabel Y dilakukan uji t, jika nilai taraf signifikasi $< 0,05$ maka hipotesis penelitian akan diterima. Sedangkan Uji F dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dapat mempengaruhi Penatausahaan Aset Tetap secara simultan. Kemudian dilakukan uji koefisien determinasi agar dapat diketahui sejauh mana variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh model regresi.

4. Hasil Analisis dan Pembahasan

4.1. Uji Reliabilitas dan Validitas

hasil dari uji reliabilitas yang menunjukkan hasil untuk variabel lingkungan pengendalian (X1)

menunjukkan *Cronbach's Alpha* bernilai 0,684 melebihi 0,6 sehingga dikatakan reliabel. Selanjutnya untuk variabel penilaian risiko (X2) juga dikatakan reliabel dilihat dari *Cronbach's Alpha* yaitu sebesar 0,892. Kemudian variabel kegiatan pengendalian bernilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,958 sehingga dapat dikatakan reliabel. Variabel informasi dan komunikasi (X4) dikatakan reliabel ditunjukkan dengan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,858. Untuk variabel pemantauan (X5) juga dikatakan reliabel dinyatakan dari *Cronbach's Alpha* sebesar 0,921. Kemudian variabel Penatausahaan Aset Tetap (Y) dinyatakan reliabel karena *Cronbach's Alpha* bernilai 0,982 melebihi 0,6.

Mengacu dari pengujian statistika menggunakan SPSS diketahui bahwa hasil dari uji validitas memiliki hasil yaitu:

Tabel. 1 Uji Validitas X1

Pernyataan	Rtabel	Rhitung	Keterangan
1	0.2632	0,712	Valid
2	0.2632	0,751	Valid
3	0.2632	0,716	Valid
4	0.2632	0,713	Valid
5	0.2632	0,764	Valid
6	0.2632	0,727	Valid
7	0.2632	0,771	Valid
8	0.2632	0,730	Valid

Mengacu pada tabel diatas, diketahui variabel X1 menunjukkan seluruh pernyataan mempunyai nilai r tabel dibawah r hitung dan dinyatakan semua pernyataan pada variabel X1 valid. Selanjutnya untuk variabel penilaian risiko (X2) adalah yaitu:

Tabel. 2 Uji Validitas X2

Pernyataan	Rtabel	Rhitung	Keterangan
1	0.2632	0,951	Valid
2	0.2632	0,949	Valid

Mengacu pada tabel diatas, diketahui variabel X2 menunjukkan seluruh pernyataan mempunyai nilai r tabel dibawah r hitung dan dinyatakan semua pernyataan pada variabel X2 valid. Selanjutnya untuk variabel Kegiatan Pengendalian (X3) adalah yaitu:

Tabel. 3 Uji Validitas X3

Pernyataan	Rtabel	Rhitung	Keterangan
1	0,2632	0,851	Valid
2	0,2632	0,804	Valid
3	0,2632	0,880	Valid
4	0,2632	0,814	Valid
5	0,2632	0,864	Valid
6	0,2632	0,829	Valid
7	0,2632	0,811	Valid
8	0,2632	0,865	Valid
9	0,2632	0,802	Valid
10	0,2632	0,877	Valid
11	0,2632	0,852	Valid

Mengacu pada tabel diatas, diketahui variabel X3 menunjukkan seluruh pernyataan mempunyai nilai r tabel dibawah r hitung dan dinyatakan semua pernyataan pada variabel X3 valid. Selanjutnya untuk uji validitas X4 adalah yaitu:

Tabel. 4 Uji Validitas X4

Pernyataan	Rtabel	Rhitung	Keterangan
1	0,2632	0,945	Valid
2	0,2632	0,929	Valid

Mengacu pada tabel diatas, diketahui variabel X4 menunjukkan seluruh pernyataan mempunyai nilai r tabel dibawah r hitung dan dinyatakan semua pernyataan pada variabel X4 valid. Selanjutnya untuk variabel pemantauan (X5) adalah yaitu:

Tabel. 5 Uji Validitas X5

Pernyataan	Rtabel	Rhitung	Keterangan
1	0,2632	0,908	Valid
2	0,2632	0,951	Valid
3	0,2632	0,928	Valid

Mengacu pada tabel diatas, diketahui variabel X5 menunjukkan seluruh pernyataan mempunyai nilai r tabel dibawah r hitung dan dinyatakan semua pernyataan pada variabel X5 valid. Selanjutnya untuk variabel penatausahaan aset tetap (Y) adalah yaitu:

Tabel. 5 Uji Validitas Y

Pernyataan	Rtabel	Rhitung	Keterangan
1	0,2632	0,881	Valid
2	0,2632	0,914	Valid
3	0,2632	0,907	Valid
4	0,2632	0,901	Valid
5	0,2632	0,898	Valid
6	0,2632	0,915	Valid
7	0,2632	0,900	Valid
8	0,2632	0,901	Valid
9	0,2632	0,852	Valid
10	0,2632	0,905	Valid
11	0,2632	0,895	Valid
12	0,2632	0,931	Valid
13	0,2632	0,892	Valid
14	0,2632	0,890	Valid

Mengacu pada tabel diatas, diketahui variabel Y menunjukkan seluruh pernyataan mempunyai nilai r tabel dibawah r hitung dan dinyatakan semua pernyataan pada variabel Y valid.

4.2. Pengujian Asumsi Klasik

Hasil pengujian normalitas menunjukkan Asymp. Sig. (2-tailed) bernilai 0,200 diatas 0,05 dan bisa dikatakan data penelitian ini terdistribusi normal.

Selanjutnya hasil dari pengujian uji multikolineritas adalah sebagai berikut:

Tabel. 6 Uji Multikolineritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.575	2.215		1.163	.250		
	SUMX1	.009	.099	.006	.091	.928	.308	3.244
	SUMX2	.582	.588	.086	.990	.327	.208	4.818
	SUMX3	.631	.164	.475	3.851	.000	.102	9.806
	SUMX4	.629	.650	.095	.968	.338	.161	6.192
	SUMX5	1.436	.453	.334	3.168	.003	.139	7.193
a. Dependent Variable: SUM(Y)								

Mengacu dari tabel hasil uji, diketahui nilai VIF memiliki nilai tidak melebihi 10 begitu juga dengan tolerance yang memiliki nilai melebihi 0,10 oleh sebab itu dinyatakan bahwa data tersebut tidak terdapat adanya multikolineritas. Pada uji heterokedastisitas dalam scatterplot dapat diketahui data tidak ada heterokedastisitas karena pola dalam scatterplot berbentuk acak dan menyebar diti sekitar 0.

4.3. Regresi Linier Berganda

Tabel. 7 Hasil Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.575	2.215		1.163	.250
	SUMX1	.009	.099	.006	.091	.928
	SUMX2	.582	.588	.086	.990	.327
	SUMX3	.631	.164	.475	3.851	.000
	SUMX4	.629	.650	.095	.968	.338
	SUMX5	1.436	.453	.334	3.168	.003

Mengacu pada tabel hasil uji, berikut persamaan regresi linier sederhana:

$$Y = 2,575 + 0,009X1 + 0,582X2 + 0,631X3 + 0,629X4 + 1,436X5$$

4.4. Uji t

Pada tabel pada sub bab sebelumnya juga dapat diketahui bahwa hanya variabel kegiatan pengendalian (X3) dan Pemantauan (X5) yang hipotesisnya dapat diterima yang signifikansinya masing-masing sebesar 0,000 dan 0,003 dibawah 0,05 dan dinyatakan variabel kegiatan pengendalian (X3) dan pemantauan (X5) memiliki pengaruh secara signifikan dan positif terhadap penatausahaan aset tetap.

4.5. Uji F

Tabel. 8 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1	Regression	10303.459	5	2060.692	.000 ^b
	Residual	865.095	50	17.302	
	Total	11168.554	55		
a. Dependent Variable: SUM(Y)					
b. Predictors: (Constant), SUMX5, SUMX1, SUMX2, SUMX4, SUMX3					

Mengacu dari Tabel. 8 memperlihatkan nilai signifikansi yaitu 0,000 dibawah 0,005 sehingga hipotesis dapat diterima. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa kegiatan penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh Unsur SPIP dengan pengaruh yang signifikan serta positif.

4.6. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini memiliki hasil yang menunjukkan nilai R square senilai 0,923 dan berarti bahwa unsur sistem pengendalian intern pemerintah mempengaruhi variabel penatausahaan aset tetap

sebesar 92,3% sedangkan 7,7% sisanya dapat dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian.

4.7. Pembahasan

Mengacu pada hasil pengujian statistic, diketahui bahwa hanya variabel kegiatan pengendalian (X3) dan pemantauan (X5) yang secara parsial berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penatausahaan aset tetap. Variabel lingkungan pengendalian tidak berpengaruh terhadap penatausahaan aset karena berdasarkan indikator-indikator, variabel lingkungan pengendalian tidak langsung mempengaruhi variabel penatausahaan aset. Sedangkan untuk variabel kegiatan pengendalian, langsung mempengaruhi variabel penatausahaan aset ditunjukkan dengan salah satu indikator dalam kegiatan pengendalian yaitu “review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan”. Hal tersebut menunjukkan bahwa indikator tersebut bersangkutan dengan kegiatan dalam penatausahaan aset yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Variabel lingkungan pengendalian juga tidak berpengaruh karena beberapa SKPD masih belum memiliki bidang aset tersendiri sehingga untuk penatausahaan aset dilakukan oleh bidang yang bukan seharusnya. Kemudian berdasarkan hasil observasi pula, bendahara barang pada masing-masing SKPD tidak hanya menjabat sebagai bendahara barang namun melaksanakan tugas lainnya di SKPD masing-masing sehingga terjadi rangkap jabatan. Hal tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya kegiatan penatausahaan aset yang menyebabkan adanya temuan terkait dengan kegiatan penatausahaan aset karena tidak optimalnya kegiatan pelaporan, inventarisasi, dan pembukuan.

penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh Unsur SPIP secara simultan dan signifikan serta positif. Hal tersebut berarti apabila SPIP meningkat, kegiatan penatausahaan aset tetap pun akan semakin baik. Berdasarkan hal tersebut, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sangat penting dilakukan dalam kegiatan penatausahaan aset tetap. Penelitian ini memiliki hasil serupa dengan penelitian Darsonia (2018) yang menyatakan penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh SPIP secara signifikan serta positif. Peneliti lainnya yaitu Trisnani (2017) juga menyatakan bahwa penatausahaan aset tetap dipengaruhi secara positif oleh SPIP.

5. Kesimpulan dan Saran

Mengacu pada hasil uji serta pembahasan, dapat dibuat kesimpulan yaitu:

1. Variabel Lingkungan pengendalian tidak memiliki pengaruh terhadap penatausahaan aset tetap. Namun sebenarnya variabel lingkungan pengendalian mempengaruhi penatausahaan aset tetap tetapi tidak secara langsung.
2. Variabel penilaian risiko tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penatausahaan aset tetap. Dikarenakan dalam indikator pada variabel penilaian risiko tidak berkaitan langsung dengan kegiatan penatausahaan aset.
3. Penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh Variabel kegiatan pengendalian dengan pengaruh yang signifikan serta positif. Hal tersebut berarti apabila kegiatan pengendalian semakin baik maka kegiatan penatausahaan aset tetap juga akan semakin baik.
4. Variabel informasi dan komunikasi tidak memiliki pengaruh terhadap penatausahaan aset tetap. Salah satu penyebabnya dikarenakan komunikasi yang terjalin antar SKPD kurang optimal sehingga menyebabkan laporan-laporan banyak yang tidak tepat waktu.
5. Variabel pemantauan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penatausahaan aset tetap. Hal tersebut berarti apabila indikator-indikator dalam variabel pemantauan dilaksanakan maka dapat menyebabkan kegiatan penatausahaan aset tetap semakin baik.
6. penatausahaan aset tetap dipengaruhi oleh Unsur SPIP secara signifikan dan positif. Dapat dikatakan berarti kegiatan penatausahaan aset tetap akan semakin baik sejalan dengan meningkatnya SPIP.

Mengacu pada hasil serta pembahasan, penulis mempunyai saran yang dapat dipertimbangkan guna menjadi masukan yang berguna bagi pihak terkait terutama Kabupaten Bandung Barat yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan SPI sudah berjalan dengan baik namun masih dapat dioptimalkan dengan baik dengan cara memaksimalkan kegiatan riviw atas kinerja yang terkait dengan pelaksanaan penatausahaan aset tetap dan melakukan pemisahan fungsi/tugas setiap bagian dalam pelaksanaan aset tetap dalam unsur kegiatan pengendalian.
2. BPKD Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat memaksimalkan pencatatan terkait dengan aset tetap mengingat masih banyak terdapat temuan-temuan terkait dengan aset tetap agar temuan-temuan aset yang sudah diatasi tidak terulang kembali dan temuan aset-aset tetap yang masih bermasalah dapat segera terselesaikan untuk mendapatkan laporan barang milik daerah yang lebih baik.
3. Apabila terdapat penambahan sumber daya manusia pada bagian keuangan/aset alangkah lebih baik jika sumber daya manusia tersebut merupakan lulusan pendidikan akuntansi sehingga memiliki bekal tentang dasar akuntansi karena sudah mengenal istilah – istilah dalam akuntansi yang diharapkan akan mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
4. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memperbanyak jadwal pembinaan dan pelatihan mengenai penatausahaan aset tetap hal tersebut didasarkan pada sebagian besar pihak yang terkait dengan penatausahaan aset tetap tidak memiliki latar pendidikan yang linier dengan tanggung jawabnya, hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi permasalahan keterlambatan pelaporan keuangan SKPD yang disebabkan laporan keuangan yang dilaporkan tidak lengkap sehingga sering mengalami revisi yang memakan waktu cukup lama
5. Sebaiknya masing-masing SKPD membuat bidang khusus dalam melakukan kegiatan penatausahaan aset sehingga tidak mneyebabkan rangkap jabatan dan menghindari keterlambatan waktu pelaporan yang berkenaan dengan set tetap.
6. Apabila terdapat peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa maka disarankan untuk melakukan penelitian pada BPKD saja mengingat BPKD berperan untuk melakukan kegiatan penatausahaan aset tetap Kabupaten Bandung Barat dan mengganti metode penelitian menjadi kualitatif agar lebih mendalam dalam melakukan penelitian.

6. Daftar Pustaka

- Agustina, A. (2015). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terhadap Pengelolaan Aset Daerah dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2016). *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. 4–211.
- Darsonia, W. (2018). *Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Dull. (2012). *Accounting Information Systems: Foundations in Enterprise Risk Management*. Cengage Learning.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi Ke Sembilan Cetakan Ke Sembilan*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hartadi, B. (1999). *Sistem Pengendalian Dalam Hubungan dengan Manajemen dan Audit*. BPFE.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16 tentang Aset Tetap*.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018. (n.d.).
- Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018. (n.d.).
- Mahardika, D. (2019). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pengamanan Aset Tetap (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bandung)*. Politeknik Negeri Bandung.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat.
- Mustika, R. (2015). *Evaluasi Penatausahaan Aset Tetap Kota Padang*. 10 No.1, 61–71. <http://ejournal.polinpdg.ac.id>
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2017). *Kabupaten Bandung Barat*. <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1057>
- Peraturan Pemerintah. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. In *Pp* (Vol. 151, Issue 4, pp. 1–46). <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025><http://dx.doi.org/10.1038/nature10402><http://dx.doi.org/10.1038/nature21059><http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127><http://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577>
- Peraturan Pemerintah. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. In *Pp* (Vol. 60, Issue 4, pp. 982–992). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-33645547325%7B&%7DpartnerID=40%7B&%7Dmd5=5c937a0c35f8be4ce16cb392381256da>
- Permendagri No. 19 Tahun 2016. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Peraturan Menteri Dalam Negeri*, 53(9), 1689–1699.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. In *Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Vol. Lembaran N* (Issue 235, p. 245).
- Rudianto. (2012). *Akuntansi Pengantar*. Erlangga.
- Sari, C. W. (2019). *Ribuan Aset Belum Bersertifikat, Pemkab Bandung Barat Sulit Beroleh WTP. Pikiran Rakyat*. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01308652/ribuan-aset-belum-bersertifikat-pemkab-bandung-barat-sulit-beroleh-wtp>
- Subrata, A. (2019). *Evaluasi Maturitas Penerapan SPIP dalam Penatausahaan Aset Tetap di Pemerintah Kota Bandung*. Politeknik Negeri Bandung.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syukriy, A. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Regulasi, dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPK di Kabupaten Aceh Jaya)*. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.

Trisnani, E. D. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bondowoso*. Universitas Jember.